
Determinan Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Gunungkidul

WkKrisna Widayati¹, Ahim Abdurahim²
^{1,2} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Article Info

Article history:

Received July 23,2022

Accepted August 30, 2022

Keywords:

Kapasitas Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengukur dan menunjukkan manfaat kenaikan kapasitas manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian internal laporan keuangan pemerintah Desa. Di dalam penelitian ini terdapat subyek penelitian salah satunya yaitu sebuah desa di Gunungkidul, Indonesia. Terdapat 62 desa sebagai sampel dengan sasaran respondennya yaitu pengelola keuangan desa. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan cara mengumpulkan data primer dan dengan menggunakan data kuesioner. Perangkat lunak analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan pengambilan sampel menggunakan convenience sampling SPSS. Model regresi yang dipakai adalah analisis garis regresi yang mempunyai lebih dari satu variabel. Hal ini menunjukkan bahwa SDM mempunyai dampak positif terhadap kualitas layanan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa, penggunaan suatu teknologi informasi dan sistem pertukaran internal tidak berpengaruh terhadap kualitas kebijakan moneter negara.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Ahim Abdurahim,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Email: ahimabdurahim@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Desa (Kemenkumham) Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan dan asal usul masyarakat. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa desa berhak menerima dana dari APBN, yang akan diserahkan secara bertahap. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa (Kemenkumham), Dana Desa adalah uang yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang kemudian ditetapkan sebagai Desa, untuk memungut pendapatan daerah Kabupaten/Kota yang dikirimkan untuk pengeluaran melalui anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada bulan Desember 2019 di dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa Selama lima tahun terakhir, anggaran Dana Desa diperkirakan sekitar Rp 330 triliun (Kemenpan_RB, 2020). Anggaran dana desa yang sudah diberikan diharapkan Desa dan kesejahteraan masyarakatnya dijalankan secara efektif dan dapat memberikan manfaat. Pemerintah desa menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan tanggung jawab mereka untuk mengelola dana tersebut ketika anggaran dana desa terlalu besar.

Penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur Desa mengakibatkan pengelolaan keuangan desa mendapat sorotan. Menurut Munti & Fahlevo (2017) pengelolaan keuangan desa yang rentan tampak bersifat sistematis, hal ini dibuktikan dengan hasil kajian evaluasi yang dilakukan oleh banyak instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurut Latrini (2018) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan dan desa antara lain adalah:

1. Egosentrisme kepala desa sebagai pemilik Badan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD).
2. Banyak pemerintah desa yang belum memahami isi dan peraturan hukum pengelolaan dana desa.
3. Pengawasan publik yang lemah.

Menurut Lubis (2019), Pengesahan UU Desa menunjuk beberapa unit Desa sebagai unit pelaporan. Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan oleh pemerintah sesuai dengan standar yang berlaku (Kemenkumham) setiap entitas pelaporan harus dibuat, pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam peraturan pemerintah adalah ukuran preskriptif yang harus terkandung dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Karakteristik yang harus dipenuhi sebuah laporan agar dianggap berkualitas tinggi meliputi relevansi, keandalan, komparabilitas, dan keterpahaman. Laporan tersebut dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan atau mereka yang digunakan untuk mempertimbangkan sebelum memutuskan apakah karakteristik kualitatif ini dapat dipenuhi.

Daerah di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sedang mengembangkan sektor infrastruktur dan pariwisatanya adalah Gunung Kidul. Daerah tersebut mempunyai 144 desa. Pada tahun 2020, pemerintah pusat meningkatkan dana desa di Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 500 core. Menurut Widiyanto (2020), ada tahun 2019, dana desa yang didapatkan di Kabupaten ini sekitar Rp 137 miliar, sedangkan dana desa yang didapatkan pada tahun 2020 sekitar Rp 142 miliar. SILPA Dana Desa 2017 dan Dana Desa 2016 serta hasil evaluasi penggunaan Dana Desa Triwulan I, II dan III Tahun 2018, Komisioner BPKP (Otoritas Pengatur Keuangan dan Pembangunan) menarik beberapa kesimpulan :

1. Di Kabupaten Gunung Kidul mempunyai kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan terus dilaksanakan meskipun tidak mengubah APBDesa dan RKPDesa
2. Di Kabupaten tersebut mempunyai pengelolaan keuangan yang lemah sebagai contoh yaitu beberapa faktor tidak mempunyai bukti transaksi (SPP) dan tidak memiliki nomor urut. Selain itu, beberapa SPP tidak memiliki tanggal yang mengakibatkan risiko duplikasi penerbitan.
3. Di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, terdapat bukti adanya pengeluaran ganda dengan dana desa.
4. Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul lebih bayar 10.264.560 rupiah untuk pengadaan bahan bangunan (BPKP_DIY, 2020).

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa disampaikan kepada gubernur/walikota melalui Bupati.. Hal ini dijelaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan disajikan kepada publik secara tertulis dan mudah diakses oleh publik melalui media informasi.

Akuntabilitas publik dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardianso, 2021). Suatu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi disebut juga akuntabilitas pertanggungjawaban vertikal. Proses pelaporan akuntabilitas vertikal biasanya dilakukan dari Pemerintah Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas disebut juga akuntabilitas horizontal. Pemerintah desa di Kabupaten Gunung Kidul sendiri telah mempublikasikan akun mereka di situs web pemerintah daerah, dan disana ditemukan beberapa pemantauan yang lemah. Pemantauan yang lemah tersebut disebabkan karena tingkat pengetahuan rumah tangga di masyarakat desa masih sedikit.

Di dalam penelitian Wlandari (2021) terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan desa yaitu efektivitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pelaksanaan sistem keuangan desa. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal di desa dan penerapan sistem keuangannya berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa, tetapi sumber daya manusianya tidak berpengaruh. Dalam penelitian ini, variabel efektivitas penerapan sistem keuangan desa diganti dengan variabel yang berasal dari penelitian pemanfaatan teknologi informasi (Rahmawati, Mustika, dan Eka, 2018).

Tinjauan Pustaka

Menurut Raharjo (2007) teori stewardship menjelaskan bahwa manajer lebih mementingkan kepentingan prinsipal dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Teori ini sering dikatakan juga sebagai teori pengabdian atau pelayanan. Teori stewardship adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku manajer yang akan berpihak pada kepentingan bersama. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik, maka manajer akan cenderung untuk berusaha bekerja sama daripada menentangnya (Pratolo & Putro, 2019).

Penerapan teori stewardship dapat dilakukan di tiga organisasi yaitu organisasi sektor publik, organisasi non profit, dan lembaga pemerintahan. Pemerintah Desa termasuk ke dalam ketiganya. Pemerintah Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi kewenangan dan kuasa untuk melaksanakan tugas yang tertera dalam deskripsi jabatan dan peraturan perundang-undangan beserta dengan kewajiban penyajian laporan keuangannya. Sedangkan masyarakat dan pemerintah pusat adalah pihak eksternal yang berkepentingan dalam menggunakan informasi keuangan tersebut. Pemerintah Desa seharusnya terdorong untuk mengelola dan menyajikan laporan keuangannya dengan sebaik mungkin jika berdasarkan pada teori stewardship ini.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan didukung oleh perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tergantung pada beberapa faktor: kepastian hukum, pemerintahan yang tertib, ketertiban umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman dan partisipasi berdasarkan prinsip.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

Laporan keuangan yaitu laporan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan (Hery, 2016). Keuangan desa mempunyai definisi sebagai keseluruhan hak dan kewajiban desa serta dapat diukur dan dinominalkan baik berupa uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa). Pengelolaan keuangan desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

APBDesa terbagi menjadi tiga, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Bentuk dari pelaporan dan pertanggungjawaban atas APBDesa adalah penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada bupati/walikota dalam 2 kali, yaitu selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari pada tahun berikutnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2010, disebutkan beberapa karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan yang relevan adalah sebuah laporan yang berisi mengenai informasi yang digunakan oleh pengguna laporan untuk mempengaruhi keputusan atau mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini.

b. Andal

Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang andal jika informasi yang terkandung dalam laporan tersebut tidak menyesatkan, diyakini kebenarannya, bebas dari kesalahan material, menyajikan semua informasi secara wajar, dan dapat diverifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Sebuah laporan keuangan lebih bermanfaat jika informasi yang dikandungnya dapat dibandingkan satu sama lain. Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan antara laporan keuangan periode berjalan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan pengguna, meskipun mereka tidak berasal dari latar belakang akuntansi.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Widodo (2010), kapasitas sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan untuk memberikan sebuah pengalaman, pendidikan, dan pelatihan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Menurut Alimbudiono and Andono (2004) Baik buruknya daya manusia dapat dinilai dari ciri-ciri seperti kaya pengalaman, pendidikan sesuai pekerjaan, keterampilan sesuai pekerjaan. Pegawai atau staff dalam bagian keuangan khususnya, membutuhkan sumber daya manusia yang harus memenuhi beberapa ketentuan. Misalnya adalah latar belakang pendidikan pegawai tersebut. Pegawai yang ditempatkan dalam bagian keuangan paling tidak harus mengetahui bagaimana sistem dan siklus akuntansi itu dijalankan, bagaimana pencatatan, penggolongan, sampai dengan penyusunan laporannya.

Penggunaan Teknologi Informasi

Wilkinson, Cerullo, Raval, and Wong-On-Wing (2020) berpendapat bahwa ada berbagai jenis teknologi informasi yaitu komputer, perangkat lunak, database, jaringan, e-commerce dan jenis teknologi lainnya. Adanya macam teknologi tersebut mendukung pengelolaan akuntansi dan keuangan untuk dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah, dan aman. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan dan kecepatan, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan.

Sistem Pengendalian Internal

Wilkinson et al. (2020) menyatakan bahwa ada lima komponen yang menjelaskan apa itu sistem pengendalian internal. Pertama adalah Standard Operating Procedure (SOP) berupa prosedur apa saja yang harus dipatuhi dan dijalankan. Kedua, pemisahan wewenang agar lebih tertata, terpercaya dan terfokus pada masing-masing bagian. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai serta diarsip agar dapat dijadikan bukti pelaksanaan suatu kegiatan. Keempat, tindakan disiplin atas pelanggaran berupa peringatan atau sanksi tegas dan hukuman. Kelima, pembatasan akses agar suatu data dan informasi tidak mudah untuk dimanipulasi. Sukmaningrum dan Harto (2012) menyatakan

bahwa Salah satu bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh lembaga dan organisasi untuk mencapai tujuannya yaitu pengendalian internal.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Menurut Yendrawati (2013), kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan kekuasaannya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien adalah definisi kompetensi manusia. Kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang penting. Menurut Moeljono and Sudjarmiko (2007) Kompetensi SDM dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Teknologi dan sistem yang canggih pun tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya sumber daya manusia yang dapat mendukung kesuksesan sistem tersebut. Suatu individu diharapkan mampu beroperasi secara berguna dan efisien bagian dalam kadar kepada menggapai target organisasi.

Salah satu faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan yaitu adanya kapasitas sumber daya manusia. Akuntansi sebagai proses pencatatan, pengidentifikasian, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul paham mengenai siklus tersebut walau sudah menggunakan teknologi informasi sekalipun.

Proses akuntansi membutuhkan sumberdaya manusia paham atau paling tidak mau untuk terus belajar bagaimana melakukan proses akuntansi yang baik dan benar sesuai dengan prosedur. Pendidikan atau pelatihan diperlukan bagi orang yang melakukan proses akuntansi. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan tersebut, orang yang melakukan pengolahan akuntansi diharapkan akan memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan yang baik sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal dan berkualitas.

Penelitian Wardani and Andriyani (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Selanjutnya, Agung (2018) juga menemukan bahwa Kapabilitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian oleh Tampubolon and Hasibuan (2019) juga Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterampilan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasar uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji hipotesis berikut:

H1: Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan teknologi informasi dalam setiap kegiatannya. Kemajuan ini dinilai dapat mempermudah dan menyederhanakan suatu proses. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan atau proses yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Menurut Nahartyo & Indriasari (2008), Pemerintah harus menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan daerah dan meningkatkan ketepatan waktu pengajuan pelaporan keuangan.

Sutarman (2012) menjelaskan tentang indikator yang dapat digunakan dalam mengukur suatu manfaat dari penggunaan teknologi informasi. Indikator-indikator tersebut adalah kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan oleh komputer dalam mengelola data, misalnya dalam bentuk perhitungan. Konsistensi berkaitan dengan hal yang dihasilkan

oleh pengolahan data tersebut. Ketepatan adalah hasil yang tepat dan akurat dari suatu pengolahan data. Keandalan berkaitan dengan dapat dipercayanya suatu informasi dan terhindar dari suatu kesalahan.

Dalam menggunakan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah telah berupaya untuk mendorong organisasi pemerintahan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan daerah, mendistribusikan informasi keuangan daerah kepada berbagai pemangku kepentingan, dan memberikan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi keuangan daerah (Kemen Kamham).

Sukarini dan Dewi (2019) melakukan penelitian tentang dampak penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan dan hasil yang didapatkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian tersebut juga sama dengan penelitian Agung (2018) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menguji hipotesis kedua yaitu:

H2: Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Adanya pengendalian internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dengan adanya pengendalian internal, risiko terjadinya kesalahan dapat diminimalkan serta dapat ditelusuri dari mana kesalahan itu berasal.

Proses panjang yang terjadi dalam siklus akuntansi memerlukan suatu pengendalian agar pengelolaan dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa sangat diperlukan adanya sistem pengendalian internal untuk dapat menghindari kecurangan dan kesalahan yang dapat dilakukan oleh perangkat Desa. Adanya pengawasan dan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi stakeholder.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengemukakan bahwa Sistem pengendalian internal dipelihara oleh manajemen dan semua karyawan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset nasional, dan undang-undang dan peraturan yang menjamin. Sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat meningkatkan keandalan data akuntansi yang dihasilkan (Warren, Reev, dan Fess, 2005). Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008), pengendalian internal pemerintah (SPIP) juga dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Proses panjang yang terjadi dalam siklus akuntansi memerlukan suatu pengendalian agar pengelolaan dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa sangat diperlukan adanya sistem pengendalian internal untuk dapat menghindari kecurangan dan kesalahan yang dapat dilakukan oleh perangkat Desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani and Andriyani (2017), sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. (Saraswati &

Budiasih, 2019) yang juga melakukan penelitian tentang dampak sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan membuktikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan searah. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Agung, 2018) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian cross sectional survey yaitu penelitian yang melibatkan satu waktu tertentu (tidak berkala/berseri). Objek penelitian adalah kualitas atau sifat atau nilai seseorang, benda atau kegiatan dengan variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti dan dari mana ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan 18 Kecamatan, 144 Desa, dan 1.431 Padukuhan. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang jumlahnya adalah 144 desa.

Subjek penelitian adalah tempat untuk mengumpulkan data variabel (Arikunto, 2010). Arikunto (2010), juga menyebutkan bahwa subjek penelitian yang berkaitan dengan unit analisis adalah suatu unit tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai tingkat Desa yang melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dikuantitatifkan. Sedangkan, data yang digunakan adalah data primer. Menurut Basuki & Prawoto (2017) pengertian dari data primer itu sendiri ada data yang telah diambil dan diolah langsung dari sumber yang berhubungan dengan penelitian tanpa melalui perantara. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat atau Perangkat Desa yang melakukan pengelolaan keuangan Desa. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut adalah data yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013), Populasi adalah bidang yang digeneralisasikan yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa di Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 144 Desa. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai subjek dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sebagian dari populasi sebagai sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk kemudahan, yaitu jarak maupun medan yang dilalui untuk menuju lokasi-lokasi yang dijadikan sampel mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dan aktivitas juga menjadi alasan dipakainya metode convenience sampling dalam penelitian kali ini. Untuk menentukan besarnya jumlah minimal sampel digunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(\alpha)^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi
- α = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolerir

Dalam penelitian ini, faktor amplitudo yang tidak tepat dimasukkan karena kesalahan pengambilan sampel masih dapat diterima 10%. Berdasarkan rumus Slovin tersebut, dihasilkan proporsi sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(\alpha)^2}$$

$$n = \frac{144}{1 + 144 (10\%)^2}$$

$$n = 59,0164 \text{ atau } 59$$

Maka diperoleh jumlah minimal sampel sebanyak 59 Desa, yang masing-masing sampel atau Desa akan diwakili oleh Pejabat atau Perangkat Desa yang melakukan pengelolaan keuangan Desa. Pengambilan tersebut menggunakan survei melalui kuesioner yang nantinya diberikan langsung kepada Pejabat atau Perangkat Desa yang melakukan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul.

Teknik untuk memperoleh data yang akan digunakan di dalam sebuah penelitian disebut juga teknik pengumpulan data. Ada beberapa cara dalam melakukan teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, survei, observasi, dokumentasi atau teknik pengumpulan data yang lain. Kuisisioner merupakan sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Responden pada penelitian ini adalah Pejabat atau Perangkat Desa yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kuesioner akan diberikan kepada Pejabat atau Perangkat Desa di tingkat Pemerintah Desa tersebut untuk diisi. Instrumen dalam penelitian akan melakukan pengukuran menggunakan skala likert dengan 5 (lima) skala, yaitu mulai dari skala 1 (satu) untuk menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala 5 (lima) untuk menyatakan sangat setuju. Skala likert tersebut akan digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini.

3. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Kuesioner yang disebar dari 144 desa sebanyak 62 kuesioner, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 61 kuesioner, dan kuesioner yang tidak dapat diproses 2 kuesioner karena jawaban yang sama untuk satu pertanyaan, sehingga total kuesioner menjadi 59.

Extraction Sums of Squared Loadings

Total	% of Variance	Cumulative %
10.526	26.315	26.315

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Dengan pengujian Common Method Variance (CMV) diperoleh prosentase atribut varian sebesar 26,315% < 50%, Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan metode umum dalam data yang diproses.

Selanjutnya dengan menggunakan uji *pearson's correlation* diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 pada setiap insrumen. Demikian pula dengan pengujian *Cronbach Alpha* diperoleh nilai signifikansi untuk semua instrumen variabel menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,7.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	0,822	Reliabel
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,811	Reliabel
Penggunaan Teknologi Informasi	0,702	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,887	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan nilai Asymp. Sig. (dua sisi) adalah 0,200, menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.24511809
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.057
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Uji multikolinearitas terlihat dari nilai tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF). Jika toleransi setiap variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel lolos uji multikolinearitas.

Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kapasitas_Sumber_Daya_Manusia	.819	1.221
	Penggunaan_Teknologi_Informasi	.552	1.813
	Sistem_Pengendalian_Internal	.565	1.770
a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan_Desa			

Sumber : Olah Data, 2020

Uji Glejser dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan nilai sig. Jika lebih besar dari alpha dari ketiga variabel (0,05), Maka dapat disimpulkan bahwa data lulus uji heteroskedastisitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.966	3.152		.624	.535
	Kapasitas_Sumber_Daya_Manusia	.084	.080	.152	1.040	.303
	Penggunaan_Teknologi_Informasi	.059	.130	.081	.454	.651
	Sistem_Pengendalian_Internal	-.069	.070	-.176	-.995	.324

a. Dependent Variable: Absres

Sumber: Olah Data, 2020

Sebelum menguji hipotesis, perlu dilakukan uji kecocokan data untuk uji regresi berganda, yaitu uji F dan uji keputusan. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05. Selain itu, dari hasil uji judgement nilai Adjusted R² sebesar 33,7%.

**Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.700	5.388		3.656	.001
	Kapasitas_Sumber_Daya_Manusia	.340	.137	.292	2.475	.016
	Penggunaan_Teknologi_Informasi	.389	.223	.251	1.745	.087
	Sistem_Pengendalian_Internal	.182	.119	.217	1.526	.133

a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan_Desa

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diuraikan model persamaan sebagai berikut:

$$KLKPD = 19,700 + 0,340SDM + 0,389PTI + 0,182SPI$$

Uji Hipotesis 1

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi kemampuan manusia untuk variabel adalah $0,016 < \text{nilai } \alpha 0,05$, dan nilai B menunjukkan arah regresi positif sebesar 0,340. Dengan kata lain, H1 dapat diterima jika kapasitas manusia berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa.

Uji Hipotesis 2

Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi $0,087 > \text{nilai } \alpha 0,05$ dan nilai B 0,389, menunjukkan arah yang positif terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi. Artinya penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu H2 tidak diperlukan.

Uji Hipotesis 3

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi sebesar $0,133 > \text{nilai } \alpha 0,05$, dan nilai B sebesar 0,182 berarah positif. Artinya, Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, sehingga H3 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Hasil pengujian hipotesis yang pertama (H1) membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa. Di dalam, ada tiga dimensi yang digunakan dalam pengukuran kapasitas sumber daya manusia ini. Ketiga dimensi tersebut adalah tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman. Dimensi tanggung jawab sendiri adalah bagaimana seorang individu dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan diskripsi jabatan yang dimilikinya. Dimensi pelatihan adalah tentang ada atau tidaknya pelatihan pada pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, serta apakah pejabat tersebut dapat menerima dan menerapkan materi dengan baik. Dimensi selanjutnya adalah pengalaman. Jika pengelola keuangan mempunyai pengalaman sebelumnya dalam mengelola keuangan, maka akan dapat mengurangi terjadinya kesalahan.

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Hasil pada pengujian hipotesis kedua (H2), diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa. Menurut tanggapan responden, penggunaan teknologi informasi belum mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa karena terdapat beberapa alasan. Pertama, meskipun setiap Kantor Desa sudah menggunakan perangkat komputer, namun perangkat tersebut masih kurang memadai karena tidak adanya pemeliharaan dan perawatan yang teratur. Kedua, jaringan internet yang kurang lancar dan kurang mendukung pada beberapa daerah. Ketiga, penyusunan laporan akuntansi belum menggunakan sistem informasi yang terintegrasi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) untuk variabel sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa. Salah satu penyebab tidak adanya pengaruh variabel sistem yaitu lingkungan pengendalian yang tidak mempunyai standar kompetensi dan fungsi pada setiap posisi serta penilaian dan pengelolaan risiko oleh pimpinan tidak dilakukan. Selain itu, aktivitas pengendalian tidak dilakukan dengan baik, seperti pencatatan pada transaksi yang belum atau tidak diotorisasi dengan baik.

4. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan oleh pemerintah

desa desa di Kabupaten Gunung Kidul. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
2. Penggunaan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
3. Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data hanya diambil melalui penyebaran kuesioner, tidak melakukan wawancara atau dokumentasi
2. Jumlah sampel terbatas, hanya diambil 59 dari 144 desa yang ada
3. Karena situasi dan kondisi pandemi *Covid-19*, pengambilan sampel hanya dipilih yang terdekat dari posisi peneliti sehingga kurang mewakili tiap desa dari kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul
4. Di dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

Saran

Peneliti memberi saran supaya penelitian selanjutnya dapat meningkatkan sampel penelitian, dan menambah variabel lain yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa, misalnya penggunaan aplikasi SISKEUDES, dan pemahaman pegawai terhadap akuntansi. Selain itu, jumlah kuesioner yang diberikan pada tiap desa perlu ditambah, sehingga responden pada tiap desa bisa berjumlah lebih dari satu orang

5. REFERENSI

- Agung, T. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2), 1253-1276.
- Alimbudiono, R. S., & Andono, F. A. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 5(02), 18-30.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). Auditing dan jasa Assurance. *Jakarta: Erlangga*.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis. *PT Rajagrafindo Persada, Depok*, 90-100.
- BPKP_DIY. (2020). Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2018. Retrieved from www.bpkp.go.id. Diakses tanggal 15 Juni 2020
- Hery. (2016). Analisis Laporan Keuangan. *Jakarta: Grasindo*.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan desain (sistem informasi pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis)*: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Determinan Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Widayati, Abdurahim)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Permedagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kemenkumham. Permedagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kemenkumham. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- Kemenpan_RB. (2020). "Rapat Terbatas Penyaluran Dana Desa". Retrieved from www.menpan.go.id diakses 20 April 2020
- Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 114.
- Lubis, S. M. Y. (2019). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
- Mardiasmo, M. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*: Penerbit Andi.
- Moeljono, D., & Sudjatmiko, S. (2007). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh*: Muhammadiyah University Yogyakarta.
- Nahartyo, E., & Indriasari, D. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). In.
- Pratolo, S., & Putro, A. R. (2019). *Akuntansi Sektor Publik di Organisasi Sektor Publik: Tinjauan Holistik Perencanaan Strategis, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Audit, dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Saraswati, I. G. A. G., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 2268-2292.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6 Buku 1.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sukarini, L., & Dewi, P. E. D. M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(3).
- Sukmaningrum, T., & Harto, P. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
- Sutarman, B. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

-
- Tampubolon, F. M., & Hasibuan, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 55-65.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. E. (2005). Pengantar Akuntansi, Accounting, Buku 1 Edisi 21.
- Widiyanto, D. (2020). Dana Desa untuk Gunungkidul Naik Jadi Rp142 Miliar. Retrieved from www.krjogja.com. Diakses pada tanggal 20 April 2020
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Wilkinson, W. J., Cerullo, M. J., Raval, V., & Wong-On-Wing, B. (2020). *Accounting Information Systems: Essential Concepts And Applications* (Fourth Edition ed.): John Wiley and Sons. Inc.
- Wulandari, G. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA (Survey Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Gunung Kidul)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal akuntansi dan auditing indonesia*, 17(2), 166-175.
- Yulianto, & Trisno. (2021). Efektivitas Kelola Dana Desa. Retrieved from www.sapa.or.id. Diakses pada 13 Februari 2021

